



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
UNIT KERJA : RSUD BALUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURULLAH HIDAJANINGTYAS**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **965777**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 754 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/50 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 6.370 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **680.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **70.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **485.500.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 219.200.000

Sub Total

Rp. 3.704.700.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.704.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.